

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022;
2. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 34 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal);
3. Dr. Jan Samuel Marinka, S.H., M.H. (Inspektur Jenderal);
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);
5. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur Jenderal Perkebunan);
6. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura);

7. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
8. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
9. Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
10. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian);
11. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian);
12. Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional) beserta jajaran;
13. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran;
14. Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta jajaran; dan
15. Frans Marganda Tambunan (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan *ID FOOD*) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022, RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan Menteri Pertanian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 per-31 Desember 2022 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp706.183.650.420,00 (tujuh ratus enam miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau mencapai 129,46% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp545.475.858.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Realisasi Belanja bersih sebesar Rp15.647.068.932.251,00 (lima belas triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau mencapai 95,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.443.954.161.000,00 (enam belas triliun empat ratus empat

puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp14.658.088.222.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.762.645.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik sebesar Rp2.462.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b. DAK non Fisik sebesar Rp300.045.000.000,00 (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi yang sudah diaudit oleh BPK RI sebesar Rp16.798.731.255.858,00 (enam belas triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kurang bayar Tahun 2020 Rp430.234.939.689,00 (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Kurang bayar Tahun 2022 sebesar Rp16.368.496.316.169,00 (enam belas triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) merealisasikan hasil rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dengan membangun 1000 kios pupuk non subsidi.
5. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) segera merealisasikan rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dengan membuka 1000-1500 kios baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan tetap berpedoman kepada

aturan yang berlaku serta memberikan kesempatan kepada BumDes, koperasi, dan/atau gapoktan sebagai kios/penyalur pupuk.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menambahkan jumlah komoditas yang memperoleh manfaat pupuk bersubsidi disesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi daerah.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Selanjutnya untuk program dan kegiatan yang realisasinya masih di bawah 50% agar direalokasi kepada program yang mendukung peningkatan produksi pertanian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151